



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 176 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa untuk penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020).

7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1258);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-49/MK.02/2021 tanggal 25 Januari 2021;

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.65-7/93 tanggal 4 Januari 2021;

3. Surat Kepala BKKBN Nomor: 3580/KP.01/B2/2020 tanggal – 30 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Penetapan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sejumlah **4.361** (empat ribu tiga ratus enam puluh satu)

- KEDUA : Masa Hubungan Perjanjian Kerja Jabatan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
- KETIGA : Hubungan perjanjian kerja antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan berdasarkan waktu yang paling singkat diantara masa hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA atau selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun jabatan yang akan diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 APRIL 2021

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,**



TJAHJO KUMOLO

Tembusan:

**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2021**

TENAGA TEKNIS

| NO. | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI CPNS | ALOKASI PPPK | UNIT PENEMPATAN |
|-----|---|--|--------------|--------------|--|
| 1. | AHLI PERTAMA - ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN | S-1 EKONOMI / S-1 KEUANGAN / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI | 1 | 0 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL, PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR, ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN |
| 2 | AHLI PERTAMA - AUDITOR | S-1 AKUNTANSI / S-1 KOMPUTERISASI AKUNTANSI / S-1 STATISTIKA / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU HUKUM | 2 | 0 | INSPEKTUR UTAMA, INSPEKTUR WILAYAH 1, AUDITOR |
| 3. | AHLI PERTAMA - AUDITOR | S-1 AKUNTANSI / S-1 KOMPUTERISASI AKUNTANSI / S-1 STATISTIKA / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU HUKUM | 2 | 0 | INSPEKTUR UTAMA, INSPEKTUR WILAYAH 3, AUDITOR |
| 4 | AHLI PERTAMA - AUDITOR | S-1 AKUNTANSI / S-1 KOMPUTERISASI AKUNTANSI / S-1 STATISTIKA / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU HUKUM | 2 | 0 | INSPEKTUR UTAMA, INSPEKTUR WILAYAH 2, AUDITOR |
| 5 | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 SOSIATRI / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 KEPENDUDUKAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 STUDI PEMBANGUNAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU KELUARGA / S-1 PAUD / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 PLS / S-1 LINGKUNGAN HIDUP / S-1 KOMUNIKASI ISLAM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 0 | 81 | PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA UTARA, BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN, DAN INFORMASI |
| 6. | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 SOSIATRI / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 KEPENDUDUKAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 STUDI PEMBANGUNAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU KELUARGA / S-1 PAUD / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 PLS / S-1 LINGKUNGAN HIDUP / S-1 KOMUNIKASI ISLAM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 0 | 8 | PERWAKILAN BKKBN PROVINSI DIY, BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI |
| 7. | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 SOSIATRI / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 KEPENDUDUKAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 STUDI PEMBANGUNAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU KELUARGA / S-1 PAUD / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 PLS / S-1 LINGKUNGAN HIDUP / S-1 KOMUNIKASI ISLAM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 0 | 46 | PERWAKILAN BKKBN PROVINSI BALI, BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI |

TENAGA TEKNIS

| NO. | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI CPNS | ALOKASI PPPK | UNIT PENEMPATAN |
|-----|--|---|--------------|--------------|--|
| 8. | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 SOSIATRI / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 KEPENDUDUKAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 STUDI PEMBANGUNAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU KELUARGA / S-1 PAUD / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 PLS / S-1 LINGKUNGAN HIDUP / S-1 KOMUNIKASI ISLAM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 0 | 20 | PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TENGAH , BIDANG ADVOKASI PENGGERAKAN DAN INFORMASI |
| 9. | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 SOSIATRI / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 KEPENDUDUKAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 STUDI PEMBANGUNAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU KELUARGA / S-1 PAUD / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 PLS / S-1 LINGKUNGAN HIDUP / S-1 KOMUNIKASI ISLAM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 0 | 34 | PERWAKILAN BKKBN PROVINSI LAMPUNG , BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI |
| 10. | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 SOSIATRI / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 KEPENDUDUKAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 STUDI PEMBANGUNAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU KELUARGA / S-1 PAUD / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 PLS / S-1 LINGKUNGAN HIDUP / S-1 KOMUNIKASI ISLAM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 0 | 45 | PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH , BIDANG ADVOKASI PENGGERAKAN DAN INFORMASI |
| 11. | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 SOSIATRI / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 KEPENDUDUKAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 STUDI PEMBANGUNAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU KELUARGA / S-1 PAUD / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 PLS / S-1 LINGKUNGAN HIDUP / S-1 KOMUNIKASI ISLAM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 0 | 37 | PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR |

K

TENAGA TEKNIS

| NO. | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI CPNS | ALOKASI PPPK | UNIT PENEMPATAN |
|-----|--|--|--------------|--------------|--|
| 12. | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 SOSIATRI / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 KEPENDUDUKAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 STUDI PEMBANGUNAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU KELUARGA / S-1 PAUD / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 PLS / S-1 LINGKUNGAN HIDUP / S-1 KOMUNIKASI ISLAM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 0 | 30 | PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KALIMANTAN BARAT, BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI, KASUBBID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN BINA LINI LAPANGAN |
| 13. | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 SOSIATRI / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 KEPENDUDUKAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 STUDI PEMBANGUNAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU KELUARGA / S-1 PAUD / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 PLS / S-1 LINGKUNGAN HIDUP / S-1 KOMUNIKASI ISLAM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 0 | 99 | PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI BARAT |
| 14. | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 SOSIATRI / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 KEPENDUDUKAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 STUDI PEMBANGUNAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU KELUARGA / S-1 PAUD / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 PLS / S-1 LINGKUNGAN HIDUP / S-1 KOMUNIKASI ISLAM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 0 | 46 | PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU UTARA, BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI |
| 15. | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 SOSIATRI / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 KEPENDUDUKAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 STUDI PEMBANGUNAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU KELUARGA / S-1 PAUD / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 PLS / S-1 LINGKUNGAN HIDUP / S-1 KOMUNIKASI ISLAM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 0 | 46 | PERWAKILAN BKKBN PROVINSI ACEH, BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI |

TENAGA TEKNIS

| NO. | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI CPNS | ALOKASI PPPK | UNIT PENEMPATAN |
|-----|--|---|--------------|--------------|---|
| 16 | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 SOSIATRI / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 KEPENDUDUKAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 STUDI PEMBANGUNAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU KELUARGA / S-1 PAUD / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 PLS / S-1 LINGKUNGAN HIDUP / S-1 KOMUNIKASI ISLAM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 0 | 41 | PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA BARAT , BIDANG ADVOKASI, PERGERAKAN DAN INFORMASI |
| 17 | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 SOSIATRI / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 KEPENDUDUKAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 STUDI PEMBANGUNAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU KELUARGA / S-1 PAUD / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 PLS / S-1 LINGKUNGAN HIDUP / S-1 KOMUNIKASI ISLAM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 0 | 56 | PERWAKILAN BKKBN PROVINSI PAPUA BARAT , BIDANG ADVOKASI, INFORMASI, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN |
| 18 | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 SOSIATRI / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 KEPENDUDUKAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 STUDI PEMBANGUNAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU KELUARGA / S-1 PAUD / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 PLS / S-1 LINGKUNGAN HIDUP / S-1 KOMUNIKASI ISLAM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 0 | 97 | PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI TENGAH , BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI |
| 19 | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 SOSIATRI / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 KEPENDUDUKAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 STUDI PEMBANGUNAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU KELUARGA / S-1 PAUD / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 PLS / S-1 LINGKUNGAN HIDUP / S-1 KOMUNIKASI ISLAM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 0 | 39 | PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAMBI , BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI |

TENAGA TEKNIS

| NO. | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI CPNS | ALOKASI PPPK | UNIT PENEMPATAN |
|-----|--|--|--------------|--------------|---|
| 20 | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 SOSIATRI / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 KEPENDUDUKAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 STUDI PEMBANGUNAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU KELUARGA / S-1 PAUD / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 PLS / S-1 LINGKUNGAN HIDUP / S-1 KOMUNIKASI ISLAM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 0 | 34 | PERWAKILAN BKKBN PROVINSI BENGKULU |
| 21 | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 SOSIATRI / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 KEPENDUDUKAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 STUDI PEMBANGUNAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU KELUARGA / S-1 PAUD / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 PLS / S-1 LINGKUNGAN HIDUP / S-1 KOMUNIKASI ISLAM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 0 | 41 | PERWAKILAN BKKBN PROVINSI GORONTALO , BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN, DAN INFORMASI |
| 22 | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 SOSIATRI / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 KEPENDUDUKAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 STUDI PEMBANGUNAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU KELUARGA / S-1 PAUD / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 PLS / S-1 LINGKUNGAN HIDUP / S-1 KOMUNIKASI ISLAM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 0 | 27 | PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN , BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI |
| 23 | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 SOSIATRI / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 KEPENDUDUKAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 STUDI PEMBANGUNAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU KELUARGA / S-1 PAUD / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 PLS / S-1 LINGKUNGAN HIDUP / S-1 KOMUNIKASI ISLAM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 0 | 117 | PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA BARAT , BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI |

TENAGA TEKNIS

| NO. | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI CPNS | ALOKASI PPPK | UNIT PENEMPATAN |
|-----|--|---|--------------|--------------|--|
| 24 | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 SOSIATRI / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 KEPENDUDUKAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 STUDI PEMBANGUNAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU KELUARGA / S-1 PAUD / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 PLS / S-1 LINGKUNGAN HIDUP / S-1 KOMUNIKASI ISLAM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 0 | 31 | PERWAKILAN BKKBN PROVINSI BANTEN , BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI |
| 25 | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 SOSIATRI / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 KEPENDUDUKAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 STUDI PEMBANGUNAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU KELUARGA / S-1 PAUD / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 PLS / S-1 LINGKUNGAN HIDUP / S-1 KOMUNIKASI ISLAM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 0 | 37 | PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI UTARA , BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI |
| 26 | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 SOSIATRI / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 KEPENDUDUKAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 STUDI PEMBANGUNAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU KELUARGA / S-1 PAUD / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 PLS / S-1 LINGKUNGAN HIDUP / S-1 KOMUNIKASI ISLAM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 0 | 103 | PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI TENGGARA , BIDANG ADVOKASI PENGGERAKAN DAN INFORMASI |
| 27 | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 SOSIATRI / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 KEPENDUDUKAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 STUDI PEMBANGUNAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU KELUARGA / S-1 PAUD / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 PLS / S-1 LINGKUNGAN HIDUP / S-1 KOMUNIKASI ISLAM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 0 | 43 | PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR , BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI |